

## International Law in News



### International Timber Organization

[http://www.itto.or.jp/live/Live\\_Server/964\\_brochure\\_aichi2005.pdf](http://www.itto.or.jp/live/Live_Server/964_brochure_aichi2005.pdf)

<http://www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageId=225>

*International Timber Organization* (selanjutnya disebut ITTO) adalah organisasi antarperintah yang bertujuan untuk mempromosikan konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan dan penggunaan dan perdagangan sumber-sumber hutan tropis. ITTO didirikan dibawah sponsor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1986 dengan 59 negara anggota yang mewakili 80 % hutan tropis di dunia dan 90% perdagangan global kayu tropis. ITTO didirikan ditengah-tengah keprihatinan dunia mengenai hutan tropis. Pada saat semua orang menyadari mengenai peningkatan penebangan hutan di negara-negara tropis, timbul kesepakatan bersama bahwa perdagangan kayu tropis merupakan salah satu kunci penting dalam pembangunan ekonomi di beberapa negara.

Berawal pada 1979 melalui negosiasi yang panjang,

lahirlah *International Tropical Timber Agreement* (selanjutnya disebut ITTA) pada sesi ke-4 Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Trade and Development* selanjutnya disebut UNCTAD). Hasil akhir dari negosiasi pada saat itu adalah ITTA 1983 yang bertugas sampai 31 Desember 1996, akan digantikan oleh ITTA 1994. Negosiasi untuk pengganti kesepakatan ini ditandatangani di bawah pengawasan UNCTAD. ITTA selanjutnya terbentuk pada 2006 dan diharapkan dapat mulai berlaku (*entry into force*) pada 2008.

ITTA terfokus pada masalah hutan tropis, konservasi hutan, dan perdagangan. ITTA meyakini bahwa perdagangan kayu dapat berjalan dengan baik apabila terdapat pengelolaan hasil hutan yang baik, sehingga dapat melindungi hutan dari kerusakan, menghindari

penurunan fungsi hutan, dan pada akhirnya terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Namun dalam perkembangannya, ITTA kemudian hanya menjadi kesepakatan bersama dalam konservasi hutan dan perkembangan perdagangan. Hal ini tertuang dalam *Brutland Report* pada 1987 dan pada *Earth Summit* 1992, yang menyatakan bahwa ITTA merupakan salah satu instrumen dalam konservasi hutan tropis. ITTA selanjutnya menjadi cikal bakal dari *International Tropical Timber Organization* (ITTO). ITTO merupakan organisasi internasional antarpemerintah yang bertujuan mempromosikan konservasi, pengelolaan yang berkelanjutan, dan penggunaan serta perdagangan sumber-sumber hutan tropis.

Pada 1990, Negara-negara anggota ITTO sepakat untuk berusaha agar perdagangan kayu tropis internasional dapat tetap menjaga kelestarian hutan. Komitmen ini dikenal dengan *Year 2000 Objective*, dimana sebagian besar dari program ITTO ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun demikian, kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan tidak menunjukkan banyak

kemajuan. Oleh karena itu, Negara-negara anggota ITTO membuat komitmen baru yang dikenal dengan *ITTO Objective 2000*, yang isinya selain menjaga kelestarian hutan juga Negara-negara anggota saling mendukung satu dengan lainnya dalam pengelolaan hutan, menjaga dan meningkatkan transparansi perdagangan, serta membuka akses ke dalam pasar internasional. Kemudian di samping Negara-negara anggota yang ada, Negara-negara non-anggota mendirikan dua dewan penasihat yang bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi mereka dalam ITTO dan memberikan masukan kepada ITTO dalam membuat suatu keputusan. Kedua Dewan Penasihat tersebut adalah *Trade Advisory Group* (selanjutnya disebut TAG) dan *Civil Society Advisory Group* (selanjutnya disebut CSAG). *Governing Body* ITTO adalah *International Tropical Timber Council* (selanjutnya disebut ITTC) yang terdiri dari negara-negara anggota. ITTO memiliki dua kategori keanggotaan, yaitu sebagai produsen dan konsumen. Kontribusi tahunan dan voting didistribusikan sejajar di antara kedua kelompok ini melalui kaukus. Dalam setiap kaukus,

keajiban dan voting setiap anggota dihitung berdasarkan perdagangan kayu dan juga luasnya hutan tropis di dalam suatu negara.

ITTO mengembangkan kebijakan-kebijakan yang disepakati secara internasional guna mempromosikan pembangunan hutan yang berkelanjutan, konservasi hutan, serta membantu negara-negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan tersebut dengan keadaan di negaranya. ITTO

juga mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan data mengenai produksi dan perdagangan kayu tropis dan menggalang dana untuk menjalankan proyek-proyek yang bertujuan bagi kemajuan industri di negara-negara berkembang. Seluruh proyek didanai melalui kontribusi secara sukarela. Donor terbesar ITTO antara lain pemerintah Jepang, Swiss, dan Amerika Serikat.

(Feitty Eucharisti, S.H.)

### **Forum PBB mengenai Hutan**

<http://www.un.org/esa/forests.htm>

Isu mengenai hutan telah menjadi prioritas dalam kebijakan internasional dan agenda politik selama kurun waktu 15 tahun terakhir. Pada 1992 dalam *United Nations Conference on Environment and Development* (selanjutnya disebut UNCED), hal tersebut merupakan isu yang paling kontroversial dan menjadi pertentangan antara Negara-negara maju dan berkembang. Negosiasi yang kuat antara pemerintah dalam UNCED, di Brazil, akhirnya menghasilkan *Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global*

*Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development* bagi seluruh jenis hutan yang dikenal sebagai prinsip-prinsip hutan yang sejalan dengan Pasal 11 Agenda 21 dalam menangani penebangan hutan (*deforestation*).

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam dasawarsa terakhir, telah mengembangkan kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan guna mempromosikan pengelolaan, konservasi, serta pembangunan yang berkelanjutan terhadap semua jenis hutan. *Intergovernmental Panel*

(selanjutnya disebut IPF), yang dibentuk dalam kurun waktu 1995–1997, dan *Intergovernmental Forum on Forest* (selanjutnya disebut IFF), yang keduanya dibentuk dalam kurun waktu 1997–2000 di bawah perlindungan *United Nations Commission on Sustainable Development*, merupakan badan antar-pemerintah (*intergovernmental body*) yang mengembangkan kebijakan-kebijakan internasional mengenai hutan.

*United Forum on Forest* (selanjutnya disebut UNFF) dibentuk berdasarkan Resolusi 2000/35 pada 18 Oktober 2000 dari *Economic and Social Committee* (selanjutnya disebut ECOSOC), sebagai bagian dari pengaturan internasional mengenai hutan dan meneruskan tugas yang dilakukan oleh IPF dan IFF sebelumnya. UNFF merupakan badan tambahan dari ECOSOC yang memiliki keanggotaan universal, terdiri dari Negara-negara anggota PBB dan Negara-negara dengan *specialized agencies*. Negara-negara anggota UNFF menunjuk *Focal Point* bagi UNFF dalam pemerintahannya.

Dalam sesi pertama pertemuan UNFF yang dilaksanakan pada 2001, Forum memutuskan untuk mengembangkan dan

memelihara kerjasama serta secara aktif berusaha untuk mengembangkan sinergi dengan anggota-anggotanya yakni *Collaborative Partnership* mengenai hutan, Komisi Pembangunan yang Berkelanjutan, dan fungsi-fungsi lain Dewan Ekonomi dan Sosial yang terkait, Organisasi-organisasi, Institusi-institusi dan Instrumen-instrumen internasional. Forum akan memberikan pertimbangan dari Sekretaris Jenderal PBB pada setiap laporan dan dokumen informasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh *Collaborative Partnership* yang dinamakan "*Collaborative Partnership on Forest Framework 2007*".

Pada 16 – 27 April 2007 di markas besar PBB di New York, diselenggarakan Sesi ke-7 pertemuan UNFF. Pertemuan tersebut membahas mengenai pemilihan pejabat, adopsi agenda dan hal-hal lain dalam organisasi, program kerja multi tahunan, instrumen-instrumen yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada seluruh jenis-jenis hutan, dialog *multistake holder*, meningkatkan kerjasama, dan koordinasi mengenai kebijakan dan program-program termasuk ketentuan petunjuk lanjutan dalam *Collaborative*

*Partnership* mengenai hutan, tanggal dan tempat untuk sesi selanjutnya, serta adopsi laporan forum sesi ke-7.

Berdasarkan Peraturan no. 15 dari *Rules of Procedure*, Komisi fungsional ECOSOC menjelaskan bahwa pada saat pertemuan pertama dari sesi reguler, UNFF wajib memilih Ketua dan pejabat-pejabat lain yang dibutuhkan diantara para perwakilan anggota-anggotanya. Berdasarkan resolusi awal dalam hal pendirian forum ini, *the Bureau* harus terdiri dari Ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua, salah satu diantaranya juga berperan sebagai *Rapporteur*, sesuai dengan prinsip distribusi geografis yang seimbang. Selanjutnya, forum ini lalu memilih Mr. Hans Hoogeveen (dari Belanda) sebagai Ketua dan Mr. Arvids Ozols dan André-Jules Madingou (dari Gabon) sebagai Wakil Ketua. Forum ini juga menugaskan kepada Mr. Cristian Maquieira untuk berperan sebagai *Rapporteur*.

Pada 28 April 2007, setelah Sesi ke-7 Pertemuan

UNFF tersebut berakhir, diadopsi *non-legally binding instrumen* bagi seluruh jenis hutan. Tujuan utama dari instrumen ini adalah:

1. Memperkuat komitmen dan tindakan politik pada seluruh tingkat untuk melaksanakan pengelolaan yang berkelanjutan secara efektif bagi seluruh jenis hutan demi tercapainya tujuan global.
2. Meningkatkan peran hutan dalam mencapai kesepakatan internasional mengenai tujuan pembangunan termasuk diantaranya *Millenium Development Goals* terutama dalam hal pemberantasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
3. Memberikan kerangka bagi tindakan-tindakan nasional dan kerjasama internasional

(Fika Yulialdina Hakim,  
S.H.)

### **Efek Kebakaran Hutan terhadap Hubungan Indonesia dengan Negara Lain**

<http://www.rsi.sg/indonesian/wacana/indonesia/view/20070514211000-1-.html>

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/press-releases/kebakaran-hutan-indonesia-menj>

<http://www.beritahumi.or.id/berita3.php?idberita=738>

Konversi lahan dan kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara global karena CO<sub>2</sub> yang dilepaskan ke atmosfer dari kedua aktivitas ini memberi kontribusi kepada perubahan iklim. Panel Antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) mengungkapkan bahwa 50 persen dari potensi mitigasi perubahan iklim dunia, dapat dicapai dengan mengurangi emisi yang disebabkan oleh deforestasi. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kawasan hutan alam asli (*intact ancient forests*) terbesar di Asia, namun kawasan tersebut mengalami laju kehancuran lebih cepat dari wilayah lain yang ada di dunia.

Kebakaran hutan di Indonesia yang telah terjadi beberapa tahun terakhir, memaksa negara-negara tetangga untuk duduk bersama membahas masalah ini. Hal ini disebabkan, asap yang ditimbulkan juga menyebar ke kawasan Asia Tenggara. Kebakaran hutan paling parah terjadi sepuluh tahun lalu pada 1997-1998, serta pada 2006. Adapun kebakaran hutan pada 1997-1998 telah mengakibatkan kerugian regional sebesar 9-10 milyar dolar Amerika. Menurut Hapsoro, Juru Kampanye

Greenpeace Asia Tenggara, siklus terjadinya kebakaran hutan terus menerus serta pengrusakan hutan di Indonesia harus mulai dianggap sebagai masalah global karena Indonesia merupakan penyumbang besar terhadap perubahan iklim dunia. Indonesia merupakan Negara yang menduduki peringkat ke tiga sebagai penyumbang terbesar atas gas rumah kaca, setelah AS dan Cina, yang bersumber dari aktivitas deforestasi, konversi lahan, dan kebakaran hutan.

Salah satu bentuk perhatian internasional berkaitan dengan masalah kebakaran hutan adalah perjanjian ASEAN mengenai kabut asap antar perbatasan yang saat ini belum diratifikasi Indonesia. Tris Mardiyati, Kepala Divisi Perjanjian dan Analisa Ratifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, menyatakan bahwa pihaknya dan juga banyak pihak lain di Indonesia sudah sangat tanggap dalam melakukan tindakan penanganan kabut asap, baik yang sifatnya mencegah maupun memperbaiki. Bahkan kerjasama dengan negara lain maupun organisasi internasional juga telah dilaksanakan. Namun demikian, kerjasama penanggulangan darurat kebakaran hutan antar-

Negara ASEAN tidak dapat dilaksanakan bila perjanjian ASEAN mengenai kabut asap antarperbatasan tidak diratifikasi oleh Indonesia.

Menurut Tris Mardiyati, keputusan mengenai ratifikasi berada di tangan DPR Indonesia. DPR sementara itu menghendaki agar perjanjian kabut asap antarperbatasan dikaitkan dengan perjanjian mengenai pencegahan pengebangan liar dan peredaran kayu liar. Rizal Sukma, Deputy Executive Director, CSIS Jakarta, menyatakan bahwa ratifikasi itu penting bukan hanya dalam konteks kabut asap, tapi dalam keseluruhan konteks politik luar negeri Indonesia terutama menyangkut posisi Indonesia di ASEAN. Selain itu, ratifikasi perjanjian ASEAN akan menjadi semacam *collective pressure* pada level regional, agar Negara-negara yang menandatangani kemudian mengambil langkah-langkah yang lebih konkret untuk menyelesaikan persoalan.

Menteri Kehutanan Indonesia menyatakan bencana kebakaran dan asap di Indonesia pada 2006 mengalami peningkatan hingga mencapai rata-rata 20 kali jumlah hot spot pada 2005. Indonesia berkomitmen untuk menekan jumlah hotspot hingga 50% pada akhir tahun ini dan seterusnya secara bertahap, hingga penghapusan total hot spot yang diharapkan bisa terjadi pada 2009.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus mengupayakan berbagai cara dan solusi baik dalam skala nasional maupun internasional. Adapun jumlah dana yang diperlukan guna mencegah kebakaran hutan diperkirakan sebesar 600 milyar rupiah, dimana pusat dan daerah melalui APBN & APBD baru dapat menganggarkan setengahnya. Kekurangan 300 milyar lainnya diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Indonesia melalui lembaga atau negara donor.

Deputi Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam & Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman menjelaskan bahwa dalam rangka mendapatkan dukungan internasional, Indonesia menjabarkan rencana yang akan dilakukannya, atau yang disebut *Plan of Action* (POA). POA yang dimaksud antara lain upaya pencegahan dengan cara sosialisasi, kampanye, dan pemberian peralatan agar masyarakat mengubah pola tanam dari membakar menjadi tidak membakar.

Kemudian, Pemerintah melalui Departemen Pertanian memberikan insentif berupa bibit dan pupuk, bagi masyarakat yang tidak membuka lahannya dengan membakar. Departemen Kehutanan juga



membuat Manggala Agni atau Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Indonesia. Selain pencegahan kebakaran di tingkat masyarakat dan individual, langkah yang sama diterapkan pula pada tingkat perusahaan. Pemerintah akan memeriksa apakah perusahaan-perusahaan pengelola lahan memiliki fasilitas pemantauan dan pemadaman kebakaran.

Lebih lanjut dalam bidang penegakan hukum, Masnellyarti Hilman menyebutkan bahwa tahun lalu sudah terdapat 28 perusahaan yang berhasil dijerat untuk masuk dalam proses penyidikan. Meskipun persentase perusahaan yang berhasil didakwa sejauh ini masih sangat kecil dan penyidikan merupakan faktor utama sulitnya memproses kasus ini, namun hal ini merupakan langkah awal yang mungkin bisa mengurangi kenakalan para pengusaha. Satu lagi langkah Indonesia untuk menekan kebakaran hutan dan lahan adalah dengan cara pemantauan. Saat ini stasiun cuaca atau alat pemantau cuaca yang dimiliki Indonesia sudah usang, sehingga memerlukan bantuan. Dengan adanya pemantau cuaca, maka bisa diketahui langkah yang tepat untuk menghadapi isu kebakaran hutan ini.

Langkah-langkah di atas dipandang baik oleh Sekretaris Jendral ASEAN, Ong Keng

Yong. Namun demikian, beliau menilai yang akan menjadi dasar permasalahan adalah bagaimana penerapan di lapangan. Masalah koordinasi di wilayah yang sangat luas, merupakan tantangan yang harus dijawab Indonesia untuk mensukseskan rencana tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia beserta Negara-negara tetangganya mulai secara bertahap membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan. Cukup banyak usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan dalam level internasional. Salah satunya melalui Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang memelopori pertemuan bertajuk *High Level International Conferences on The Implementation of Indonesia's Comprehensive Plan of Action on Forest & Land Fire Control in South East Asia*. Konferensi ini merupakan persiapan teknis yang rekomendasinya akan disampaikan pada *2nd Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution*. Selain menyiapkan rekomendasi, tujuan dari konferensi ini juga untuk mencari dukungan dari para negara dan lembaga donor. Masnellyarti Hilman juga menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah mengundang *high level country* sebagai Negara donor juga agensi.



Sejak November 2006, telah cukup banyak kemajuan seperti Singapura yang membantu Jambi, Sumatra Selatan dibantu Uni Eropa, Belanda yang membantu pemerintah Kalimantan Tengah, begitu juga Australia bagian Barat. Pemerintah juga meminta lebih banyak lagi Negara donor dan agensi untuk membantu. Salah satunya Malaysia, yang bersedia membantu dalam *capacity building*, namun belum dapat segera terlaksana dikarenakan perlunya penyesuaian dalam isu *enforcement* dan standarisasi perkebunan. Dukungan negara-negara ini sangat diperlukan,

karena Indonesia tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal finansial maupun keahlian. Hal yang menguntungkan adalah berbagai pihak, baik negara maupun organisasi mancanegara menaruh minat besar untuk membantu penanganan kebakaran hutan Indonesia. Hal ini dikarenakan Negara-negara di dunia, baik Negara yang berdekatan dengan Indonesia maupun yang berjauhan, melihat pentingnya kontribusi hutan di Indonesia terhadap lingkungan internasional.

(Feitty Eucharisti, S.H.)

### **Majelis Umum PBB Mendeklarasikan Tahun 2011 sebagai Tahun Hutan Internasional**

<http://www.un.org/News/Press/docs/2006/ga10565.doc.htm>

[http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf\\_files/events/UNFF%20Pekka%20Patosaari%202011%20Year%20of%20Forests.pdf](http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/events/UNFF%20Pekka%20Patosaari%202011%20Year%20of%20Forests.pdf)

Isu kehutanan telah menjadi prioritas dari kebijakan internasional serta agenda politik selama 15 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan hutan sebagai dasar bagi pengetahuan alam dan sebagai suatu ekosistem, memainkan peran yang serius dalam mengurangi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan telah beralih fungsi

menjadi tanah pertanian dan mengalami kerusakan akibat penebangan kayu yang tidak berkelanjutan serta pengelolaan lahan yang tidak seimbang. Menurut Mr. Pekka Patosaari, Direktur dari *United Nations Forum on Forest Secretariat*, tantangan yang ada saat ini bukan lagi mengenai peningkatan kesadaran akan pentingnya hutan namun bagaimana Negara-negara

dapat bergerak secara nyata untuk memulihkan hutan. Atas dasar pemikiran ini, Negara-negara Anggota dari *United Nations Forum of Forests (UNFF)* kemudian mengadopsi tujuan global berupa komitmen untuk memulihkan kerusakan hutan di dunia.

Lebih lanjut, pada 21 Desember 2006, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 61/193 yang pada intinya memuat:

1. Memutuskan tahun 2011 sebagai Tahun Hutan Internasional;
2. Menugaskan Sekretariat UNFF, dan Departemen Urusan Sosial dan Ekonomi untuk bertindak sebagai *Focal Point* dalam mengimplementasikan program tersebut dengan kolaborasi bersama Pemerintah Negara-negara anggota, organisasi Internasional, Regional dan Subregional;
3. Mengundang *Food and Agriculture Organization (FAO)* sebagai *Chair of the Collaborative Partnership* untuk mendukung program tersebut;
4. Meminta kepada Pemerintah Negara-negara Anggota, Organisasi-organisasi internasional dan regional untuk turut

berpartisipasi dalam program ini;

5. Mendorong kerjasama sukarela di antara Negara-negara Anggota, Organisasi Internasional, dan group utama dalam memfasilitasi dan mendukung aktivitas yang berhubungan dengan program ini; dan
6. Meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk memberikan laporan kepada Majelis Umum PBB pada sesi ke 64 mengenai persiapan program tersebut.

Tujuan dari program Tahun Hutan Internasional diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan juga mendukung tindakan-tindakan global dalam pengaturan hutan yang berkelanjutan, dan pelestarian serta perkembangan seluruh jenis hutan termasuk diantaranya pohon-pohon yang terletak di luar hutan. Hal ini merupakan undangan terbuka bagi komunitas dunia untuk datang bersama-sama dan bekerja dengan Pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat umum yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa hutan yang ada telah diatur dengan baik bagi generasi masa kini dan masa mendatang.

Jepang sebagai pengimpor kayu lapis Indonesia terbesar, yang mencapai lebih dari 60% ekspor Indonesia pada 2005, diikuti oleh AS (14%), Uni Eropa (13%) dan Cina (9%). Melalui kampanye itu, Green Peace juga mengecam negara-negara maju yang dengan sadar menerima dan menyokong industri penebangan ilegal di Indonesia.

Maraknya penebangan liar di Indonesia seakan makin digiatkan dengan padatnya permintaan perusahaan asing yang tidak peduli dengan sertifikasi kayu. Bukan hanya menjadi penjual, pihak asing juga memainkan peran yang lebih aktif dalam pengrusakan hutan secara massif. *Center for International Forestry Research* (CIFOR) mengindikasikan bahwa pembalakan hutan merupakan kejahatan terorganisasi dengan sindikat Internasional yang tidak jarang didukung oleh institusi pemerintah sejumlah negara.

Ironisnya, negara yang menjadi konsumen kayu ilegal Indonesia adalah negara-negara maju dengan tuntutan tinggi bagi Indonesia untuk menjaga hutannya. negara-negara semisal Amerika Serikat, Jepang, Inggris, China dan beberapa negara Uni Eropa yang telah mendatangi konvensi internasional perlindungan spesies dilindungi (CITES)

malah turut menjadi konsumen kayu ilegal tersebut. Bahkan, negara semisal Malaysia dan Singapura yang selalu sibuk dengan asap hasil kebakaran hutan di Indonesia juga disebut-sebut menjadi bagian penting mafia dan sindikat Internasional tersebut.

Investigasi *Environmental Investigation Agency* dan Telapak Indonesia menyebutkan bahwa negara Malaysia, dan Singapura menjadi pusat pemutihan dan perdagangan kayu ilegal dari jenis-jenis langka dari Indonesia, senilai miliaran dollar AS setiap tahunnya. Malaysia memutihkan kayu curian menjadi komoditas legal dengan cara memalsukan dokumen asal komoditas seolah-olah kayu tersebut berasal dari Malaysia sendiri. Kemudian dari Malaysia, sebagian besar kayu tersebut kemudian diimpor menjadi bahan baku industri mebel dan industri berbasis kayu lain di China. Sebagian lagi, diekspor langsung ke negara-negara maju, terutama AS dan Eropa<sup>1</sup>. Bukti nyata keberadaan pihak asing dan sindikat Internasional jelas tampak pada Penangkapan sembilan Warga Negara Malaysia pada 2005

---

<sup>1</sup> Kompas; 13 Januari 2007

Berbagai macam kegiatan akan dilakukan untuk menyelenggarakan Tahun Internasional dan pertukaran pengetahuan dalam membantu strategi-strategi praktis untuk mempromosikan pengaturan hutan yang berkelanjutan. Sesuai dengan isi resolusi untuk memfasilitasi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka Pemerintah,

Organisasi regional dan internasional, serta organisasi kemasyarakatan diharapkan membentuk panitia nasional dan menugaskan *Focal points* di Negara masing-masing. Sekretariat *the United Forum on Forests* bertugas sebagai *Focal Point* dalam pelaksanaan Tahun Hutan Internasional ini.

(Fika Yulialdina, S.H.)

### **Sindiket Internasional Penebangan Hutan**

<http://www.greenpeace.com>

<http://www.kompas.co.id>

Sebuah spanduk aktifis Green Peace bertuliskan "*Stop Ancient Forest Destruction*" (Hentikan Perusakan Hutan Purbakala) menghadang sebuah kapal angkutan pengangkut bernama MV Ardhianto. Kapal peti kemas tersebut tengah memuat 6.000 meter kubik kayu lapis, atau *plywood*, dengan tujuan Jepang dan Korea, dan 3.000 meter kubik untuk AS. Kayu tersebut berasal dari pabrik Henrison Iriana, sebuah cabang dari salah satu perusahaan kayu terbesar Indonesia, Kayu Lapis Indonesia (KLI), dan akan dibawa ke Jepang, Korea dan AS.

Serta merta, aksi simbolik ini mengejutkan bukan saja bagi masyarakat Indonesia melainkan

juga bagi masyarakat dunia. Bersama dengan aksi hadang tersebut, Green Peace juga menyebarkan data bahwa paling tidak 76% penebangan kayu di Indonesia adalah ilegal. Kayu hasil penebangan liar tersebut kemudian dijual kepada perusahaan-perusahaan seperti KLI di Indonesia, atau 'menghilang' di lepas pantai untuk memberi melayani pasar global.

Kayu dari Indonesia memang sedang menjadi incaran pasar dunia disebabkan harganya yang murah. Perusahaan di Indonesia pun tidak ragu-ragu untuk menerima pesanan tanpa memperhitungkan keselamatan dan keamanan hutan. Green Peace mencatat keberadaan

sebagai bandar penebangan liar di Papua. Pada 2003, Departemen Kehutanan (Dephut) mencatat, setiap tahun sedikitnya 10 juta meter kubik kayu diselundupkan dari Kalimantan, Papua, Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan tujuan antara lain, Malaysia, Cina, India, dan Vietnam. Penyelundupan kayu dari Papua saja, mencapai 600.000 meter kubik dengan kerugian mencapai Rp 600 milyar per bulan atau Rp 7,2 trilyun per tahun. Harga kayu selundupan ini dihargai sangat murah yakni sekitar Rp 1 juta per meter kubik.

Hadimya sindikat Internasional di Indonesia memang tidak terlepas dari masalah sistem ekonomi politik yang korup, keamanan, dan hukum yang ada di Indonesia. Kelebihan kapasitas di industri kayu, tingginya permintaan domestik dan internasional terhadap kayu ilegal hingga tidak adanya kejelasan tata batas kawasan hutan menjadi salah satu penyebab maraknya kasus penyelundupan kayu ilegal.

Sindikat ini, bukan saja hanya berasal dari pemerintah dalam negeri, melainkan juga merambat pada lembaga pembiayaan semisal bank di

Indonesia. Melalui jaringan yang sudah terbentuk cukup lama, sindikat penebangan liar ini membentuk mafia hutan yang melibatkan bukan saja pihak asing melainkan juga pejabat pemerintah di Indonesia. Bahkan keterlibatan perbankan lokal dan internasional juga turut memberikan tempat pada industri penebangan liar di Indonesia. Sebelum 1997 saja, volume pinjaman dari bank-bank lokal kepada industri kayu mencapai 4 miliar dolar lebih, sementara dari perbankan internasional 7 miliar dolar AS. Kesemuanya jelas secara dibentuk oleh system kuat dan melibatkan multisektor.

Payung hukum yang selama ini ada masih menggunakan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Namun, perangkat hukum tersebut masih dianggap tidak mampu menjerat pelaku utama penebangan liar. Pada 2005, sebanyak 173 orang ditangkap namun sebagian besar dibebaskan, dan jika dihukum mendapat hukum yang sangat ringan.

Dalam banyak kasus, aliran uang hasil penyelundupan ini pun seharusnya dapat dijerat melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemberantasan kejahatan kehutanan, terutama penebangan liar. CIFOR dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kajiannya mengungkapkan, upaya pemberantasan penebangan liar akan lebih kuat lagi jika didukung oleh pendekatan penegakan hukum pencucian uang. Pengungkapan aktor-aktor di belakang layar bisa dilakukan dengan menelusuri aliran uang lewat mekanisme perbankan.

Departemen Kehutanan kini hanya menggantungkan harapan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Pembalakan Liar yang dalam 2007 ini segera masuk proses legislasi di DPR. Menurut Boen Purnama dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dephut Suparmo, RUU ini akan memberikan terobosan atas kebutuhan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya sebuah pengadilan ad-hoc atau pengadilan khusus untuk mengadili para pelaku pembalakan hutan dengan ancaman denda dan hukuman

yang sangat berat hingga hukuman mati.

Kasus Kayu Lapis Indonesia (KLI) dan gebrakkan Green Peace menjadi penyadar masyarakat Indonesia dan Internasional dalam membongkar praktik jual beli kayu ilegal ke luar Indonesia. Dalam laporannya berjudul "Kayu Lapis Indonesia: the Untouchable God of Indonesian Ancient Forest Destruction!" menyimpulkan bahwa KLI terbukti menjual kayu-kayu tanpa identitas resmi yang kemudian diekspor ke luar negeri. Bahkan di akhir laporannya, Green Peace kembali mengingatkan bahwa KLI hanya merupakan satu dan sekian banyak perusahaan lokal dan global yang dengan sengaja melakukan penjualan kayu hasil penebangan liar ke luar negeri.

Pemerintah Indonesia, memang harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan sesegera mungkin melakukan moratorium penebangan hutan yang memberikan jeda untuk pembalakan lebih lanjut. Sedangkan untuk jangka panjang, upaya penegakkan hukum nasional maupun internasional harus ditegakkan secara komprehensif untuk membongkar mafia kayu yang

tidak lagi terbatas teritorial dan kebangsaan, agar Indonesia tidak harus kehilangan lagi hutannya yang ditebang untuk asing, yang jumlah luas kerusakan hutannya lebih dari empat kali pulau Jawa.

"Jika pohon terakhir telah ditebang, jika sungai terakhir telah tercemar, jika

ikan terakhir telah ditangkap, baru manusia akan sadar bahwa mereka tidak akan bisa makan uang." Green Peace.

(QurrataAyuni,S.H.)

### **Pertemuan Ad-Hoc Expert Groups dari United Nations Forum on Forests (UNFF) dalam Menyusun Non-Legally Binding Instrument, 11-15 Desember 2006**

<http://www.un.org/esa/forests/about.html>

<http://www.un.org/esa/forests/adhoc-nlbi.html>

Sebagai organ tambahan (*subsidiary body*) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk dengan Resolusi *Economic and Social Council (ECOSOC)* Nomor 2000/35, *United Nations Forum on Forests (UNFF)* bertujuan untuk mendorong pengelolaan, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan. Salah satu tugas UNFF yang sedang dipersiapkan ke depan adalah menyusun perjanjian yang berisi ketentuan yang tidak mengikat (*non-legally binding instrument*) mengenai kehutanan yang akan disepakati pada pertemuan sesi

ke-7 pada April 2007. Sebelumnya, pada 11-15 Desember 2006 di New York, dilaksanakan pertemuan terbuka tim ahli *ad hoc (open-ended ad hoc expert group)* untuk mempersiapkan finalisasi instrumen tersebut pada pertemuan sesi ke-7.

Tim ahli bertugas untuk memberikan saran teknis dan ilmiah kepada UNFF yang sedang menyusun materi dari *non-legally binding instrument*. Dalam menjalankan tugasnya, tim ahli akan menerima kompilasi dari rancangan dan proposal *non-legally binding instrument* yang diberikan oleh



negara-negara peserta UNFF pada pertemuan sesi ke-6, beserta proposal yang diberikan kemudian, atau komentar dari Negara-negara peserta menyangkut proposal-proposal itu. Tim ahli kemudian akan memberikan pendapat dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen tersebut.

Atas dasar ini, tim ahli menerima 18 proposal dan lima komentar. Enam proposal pertama berasal dari Grup Afrika, Australia, Brazil, Canada, The European Union (EU), Amerika Serikat, dan ASEAN. Sedangkan 12 proposal tambahan diberikan lagi oleh Australia, Brazil, ASEAN, Colombia, EU, Indonesia, Jepang, Pakistan, Afrika Selatan, Swiss, Amerika Serikat, dan Zimbabwe. Sedangkan lima komentar berasal dari Colombia, Pakistan, Indonesia, Korea Selatan, dan Swiss.

Tim ahli ini beranggotakan pakar-pakar yang ditunjuk oleh pemerintah dari tiap negara peserta. Setiap anggota tim berpengalaman secara teknis dan ilmiah dalam bidang kehutanan, Deklarasi Rio 1992 dan UNFF, dan forum internasional lain seperti *Intergovernmental Panel on Forests* (IPF) dan *Intergovernmental Forum on Forests* (IFF).

Tim ahli ini berhasil merumuskan beberapa elemen substansial mengenai *non-legally binding instrument* yang diberi judul "Non-

legally Binding International Instrument/ Understanding/Code for the Sustainable Management of All Types of Forests." Substansi utama ini dapat dilihat dalam prinsip umum yang berhasil disepakati, antara lain:

1. Instrumen ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari *Rio Forest Principles* dan *Rio Declaration on Environment and Development* yang diadopsi oleh PBB pada 1992. Instrumen ini tidak mengikat secara hukum, tidak diatur oleh hukum internasional, dan tidak dimaksudkan untuk memberikan hak atau kewajiban dalam hukum;
2. Pengelolaan hutan harus mempertimbangkan seluruh aspek baik ekonomis, sosial, ekologis, budaya, dan spiritual;
3. Langkah-langkah, kebijakan, dan tindakan dilaksanakan secara nasional dengan orientasi kontribusi secara global. Artinya, setiap negara berhak mengelola hutannya atas dasar prinsip kedaulatan, namun harus selaras dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang memberikan batas waktu pencapaian target nasional. Selain itu, tiap negara diharapkan tetap mempertimbangkan rencana aksi yang sudah disepakati secara global dalam IPF dan IFF;

4. Setiap negara bertanggung jawab atas pengelolaan berkelanjutan dari hutannya, dengan memperhatikan kondisi ekonomis dan geografis, dan kapasitasnya termasuk melalui pengembangan sumber daya manusia, kepemilikan hutan, penyelenggaraan *good governance* dalam level nasional dan internasional, dan penyediaan keuangan yang memadai. Seluruh hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dan daya saing dari hutan di masa mendatang;
  5. Masyarakat internasional dapat mendukung pengelolaan kehutanan dengan menyediakan bantuan keuangan dan pembentukan dana *trust* khusus bidang untuk kehutanan, meningkatkan alih teknologi, berbagi pengalaman, dan kerjasama dalam peningkatan sumber daya (*capacity building*);
  6. Pengelolaan hutan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk sektor swasta, pemilik hutan, masyarakat lokal, dan wanita. Oleh karena itu, perlu dibentuk sistem yang transparan dan partisipatoris untuk menjamin keterlibatan seluruh pihak;
  7. Kerangka pengelolaan hutan berkelanjutan berdasarkan atas prinsip "tujuh elemen tematis" (*seven thematic elements*), yang terdiri dari:
    - a. *Extent of forest resources*;
    - b. *Forest biological diversity*;
    - c. *Forest health and vitality*;
    - d. *Productive functions of forest resources*;
    - e. *Protective functions of forest resources*;
    - f. *Socio-economic functions of forests*; dan
    - g. *Legal, policy, and institutional framework*.
- (MuhammadAjisatria)

**Penyelenggaraan International Expert Meeting on  
"Multi Year Programme of Work of United Nations  
Forum on Forests: Charting the Way to 2015,"  
di Nusa Dua, Bali, 13-16 Februari 2007**

<http://www.un.org/esa/forests/gov-unff.html>  
<http://www.un.org/News/Press/docs/2007/envdev918.doc.htm>

Pada 13-16 Februari 2007, diselenggarakan pertemuan ahli tingkat internasional (*international expert meeting*) di

Nusa Dua, Bali Indonesia. Pertemuan ini didorong atas inisiatif negara-negara (*country-led initiative*) untuk mendukung

program *United Nations Forum on Forests* (UNFF), khususnya untuk pertemuan UNFF sesi ketujuh (UNFF7). Pemerintah Jerman dan Indonesia menjadi penyelenggara pertemuan dengan didukung oleh Belanda, Norwegia, Swiss, Kanada, Australia, Austria, Amerika Serikat, Finlandia, Sekretariat UNFF, Bank Dunia, dan *Center for International Forest Research*. Adapun tema yang diangkat dalam pertemuan ini adalah "Multi Year Programme of Work of United Nations Forum on Forests: Charting the Way to 2015."

UNFF sendiri merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar resolusi yang dikeluarkan oleh *Economic and Social Council of the United Nations* (ECOSOC) (Resolution 2000/35). UNFF bertujuan untuk mendorong pengelolaan, pelestarian, dan pembangunan berkelanjutan dari setiap tipe hutan dan juga untuk memperkuat komitmen politik jangka panjang antar negara. Sebagai forum yang membahas kebijakan antar negara, UNFF terdiri dari seluruh anggota United Nations (UN) dan badan-badan khusus UN yang bertemu setiap tahunnya.

Pada pertemuan UNFF7 yang akan diselenggarakan pada 16-27 April 2007, pemerintah dan *civil society* dari berbagai negara bertemu dan diharapkan dapat

menghasilkan perjanjian internasional mengenai pengelolaan hutan di dunia secara berkelanjutan. UNFF7 juga memiliki agenda untuk mengelaborasi *Multi Year Programme of Work/MYPOW* (Program Kerja Jangka Panjang) UNFF untuk periode 2007-2015. Program kerja ini merefleksikan tujuan umum, fungsi, dan strategi makro mengenai pengelolaan hutan pada tingkat internasional yang akan difasilitasi oleh UNFF. Termasuk di dalamnya adalah tugas utama dan pedoman kebijakan yang akan diadakan dalam sesi-sesi berikutnya di masa depan.

Oleh karena itu, beberapa negara berinisiatif membuat pertemuan ahli tingkat internasional ini agar memperoleh pemahaman yang memadai sebelum UNFF7 diselenggarakan. Ada tiga agenda dalam pertemuan ahli ini, yang selanjutnya dibahas di dalam tiga kelompok kerja paralel.

*Pertama*, penentuan tema dari sesi UNFF. Mayoritas peserta paham bahwa MYPOW harus menitikberatkan pada implementasi dan keberhasilan dari *Global Objectives on Forests*. Selain itu, para peserta juga sepakat bahwa harus ada permasalahan yang akan terus di kritisi dan menjadi isu utama dalam setiap sesi, termasuk sesi ketujuh. Namun topik ini harus dibatasi agar sesi diselenggarakan

secara fokus. Dengan demikian, para ahli sepakat bahwa MYPOW sudah harus menentukan dasar-dasar tema yang akan diselenggarakan untuk pertemuan UNFF sesi kedelapan (2008-09) sampai sesi kesebelas (2014-2015). Dalam MYPOW juga akan diakomodasi agenda-agenda spesifik seperti perencanaan dan peluncuran *International Year on Forests* (2011) dan kontribusi kepada *UN Commission on Sustainable Development* (2011). Kedua, nilai-nilai unggul (*modalities*) yang akan dimuat dalam MYPOW. *Modalities* diartikan sebagai metode atau mekanisme kerja UNFF yang menjamin implementasi efektif dari mandat UNFF sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Forest Management* (SFM) dan *International Arrangement on Forest* (IAF). Termasuk di dalamnya: perencanaan dan peluncuran *International Year of Forests*, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, prakiraan hasil, persyaratan pembuatan laporan, pengawasan, dan pemantauan. Jadi pada intinya, kelompok kerja ini menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan struktur dan prosedur kerja yang efektif pada MYPOW. Ketiga, pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan dimensi regional dan sub-regional dari MYPOW.

Kelompok kerja ketiga ini menggagas langkah-langkah dalam memperkuat interaksi antara UNFF dengan mekanisme, lembaga, proses, atau organisasi lain pada tingkat regional dan subregional. Peserta kelompok kerja paham bahwa permasalahan dan tantangan dari tiap wilayah regional berbeda sehingga perlu ditekankan pentingnya interaksi semacam ini. Mekanisme yang dimaksud adalah dengan komunikasi dan interaksi antara UNFF dengan lembaga-lembaga tersebut melalui koordinasi informasi pada UNFF. UNFF juga perlu memberikan pedoman kepada mereka untuk mendukung agenda dan program pengembangan kehutannya masing-masing. Kesimpulan kelompok kerja ini adalah bahwa mekanisme koordinasi yang ada saat ini sudah memadai dan tidak diperlukan penambahan lagi, namun efektivitasnya yang harus ditingkatkan.

Pada akhirnya, pertemuan ahli pada tingkat internasional ini sangat menarik minat banyak pihak, terutama karena mereka dapat bertukar pikiran sebelum menentukan MYPOW dari UNFF untuk periode 2008-2015. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gagasan-gagasan produktif yang muncul dalam pertemuan ini.

(Muhammad Ajisatria)

## Isu-isu Kehutanan dalam Perdagangan Internasional

<http://www.fao.org/docrep/003/x7354e/X7354e13.htm>

<http://www.wri.org/biodiv/pubs/description.cfm?pid=2999>

Isu-isu kehutanan relevan untuk diperbicangkan dalam konteks perdagangan internasional karena beberapa alasan. *Pertama*, permintaan terhadap produk-produk kehutanan selalu meningkat. Meskipun demikian, perdagangan atas produk kehutanan tidak banyak yang diperdagangkan dalam pasar global dan hanya terfokus pada konteks regional sehingga diperlukan perluasan pasar. *Kedua*, produksi kehutanan yang berasal dari hutan tropis hanya memiliki porsi kecil dalam pasar global. *Ketiga*, negara berkembang hanya mendapat porsi kecil dalam pasar global. Pun negara berkembang ini hanya didominasi oleh Indonesia, Malaysia, dan Republik Rakyat Cina (RRC).

Sebagai hasil Putaran Uruguay dari *World Trade Organization* (WTO), produk kehutanan dikategorikan sebagai produk industri, sehingga tidak termasuk dalam *Agreement on Agriculture*. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengaturan yang berlaku bagi produk kehutanan sebagaimana juga berlaku bagi produk pertanian, antara lain *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS Agreement) dan

the *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT Agreement).

Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam perdagangan internasional dalam kaitannya dengan produk kehutanan antara lain:

### 1. Tarif.

Secara umum, tarif untuk produk kehutanan khususnya di negara maju sebenarnya tidak tinggi, yaitu sekitar 5 persen. Penurunan tarif difokuskan untuk beberapa pasar lain yang memberikan tarif sekitar 10-15 persen, terutama untuk produk seperti *plywood*. Namun sebenarnya banyak negara yang dapat menurunkan tarif di bidang kehutanan melalui langkah-langkah regional seperti ASEAN, NAFTA, dan juga dapat memperoleh fasilitas yang diberikan kepada negara berkembang dengan *General System of Preferences* (GSP).

### 2. *Non-Tariff-Measures* (NTMs).

Beberapa NTMs yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional atas hasil hutan antara lain:

a. *Quantitative Restrictions*, biasanya dengan penerapan kuota atas produk kehutanan. European Union, misalnya, menerapkan

kuota untuk *fibre-building boards, builders' woodwork* dan beberapa produk furnitur.

b. *Phytosanitary and technical regulations and standards*. Standard dan pengaturan *phytosanitary* (kesehatan tanaman) biasanya diberlakukan atas dasar pertimbangan lingkungan hidup. Beberapa pengaturan yang mempengaruhi produk kehutanan antara lain: larangan panel kayu untuk menggunakan *formaldehyde glues*, yaitu gula yang dapat membahayakan kesehatan manusia; atau larangan untuk beberapa metode pengawetan kayu yang tidak ramah lingkungan hidup.

c. *Export Restrictions*. termasuk diantaranya pajak ekspor, larangan ekspor, dan pengaturan lainnya. Hambatan ekspor ini biasanya berlaku untuk produk seperti *logs, sawnwood* dan *plywood*. Hambatan ekspor biasanya diterapkan untuk menambah pemasukan negara dan melindungi industri dalam negeri.

Selain isu di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu didiskusikan lebih jauh, yaitu mengenai *trade impediments* (hambatan perdagangan). *Trade impediments* adalah hambatan-hambatan yang legal berdasarkan ketentuan GATT-WTO, namun memiliki

implikasi yang besar terhadap perdagangan produk kehutanan. *Trade impediments* biasanya berdasarkan atas motif perlindungan lingkungan hidup, dan tidak sedikit yang merupakan langkah sukarela sehingga tidak terkait dengan kebijakan negara. Beberapa contoh dapat diberikan sebagai berikut:

a. Hambatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Negara dapat menetapkan kebijakan atas dasar perlindungan ekosistem hutan yang dapat menghambat perdagangan. Contoh yang diberikan antara lain metode pengangkutan, pengolahan, dan konsumsi produk kehutanan, energi yang digunakan dalam proses pengolahan, serta masalah pengelolaan polusi dan pembuangan limbah produksi. Permasalahan ini yang menjadi salah satu fokus pada WTO *Comitte on Trade and Environment* (CTE) terutama dalam upaya harmonisasi kebijakan tersebut dengan perjanjian TBT dan SPS.

b. Larangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah (*local governments*).

Kebijakan pemerintah daerah/negara bagian dapat mempengaruhi perdagangan produk kehutanan, sebagaimana

yang terjadi di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia.

c. Sertifikasi produk kehutanan  
Sertifikasi produk kehutanan banyak menuai isu, baik dalam kaitannya dengan perdagangan internasional atau dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan sertifikasi produk kehutanan, setiap produk memiliki status yang menentukan negara asal produk tersebut. Sertifikat hanya diberikan atas produk kehutanan yang sah dan dikelola secara berkelanjutan. Tujuannya, pembeli hanya akan membeli produk yang memiliki sertifikat tersebut dan produk kehutanan yang tidak memiliki sertifikat patut dicurigai sebagai hasil aktivitas *illegal logging*.

Kontroversi timbul karena sertifikasi dapat menjadi hambatan perdagangan yang akan meningkatkan harga produk kehutanan. Produsen yang bergerak di bidang kehutanan juga belum dapat memahami batas-batas dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Sementara itu, apabila sertifikasi dikeluarkan secara internasional, maka hanya negara maju yang mendapat keuntungan. Hal ini karena banyak negara berkembang yang belum tentu dapat memenuhi persyaratan sertifikasi yang diberikan.

d. Hambatan dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)*

CITES adalah perjanjian internasional yang mengandung pengaturan yang dapat menghambat aktivitas perdagangan internasional. Dalam CITES, setiap negara berhak untuk mengeluarkan ijin atas perdagangan spesies langka. Spesies langka ini dikategorikan menjadi tiga sebagaimana tercantum dalam tiga lampiran CITES, yaitu: *Appendix I* tentang *essentially prohibits commercial trade*, yaitu spesies yang secara mutlak tidak dapat diperdagangkan; *Appendix II* yang mensyaratkan pemberian ijin ekspor untuk perdagangan beberapa spesies langka; dan *Appendix III* yang juga mensyaratkan pemberian ijin ekspor dan sertifikat negara asal spesies (*certificate of origin*) untuk spesies-spesies tertentu. Aktivitas dari gerakan perlindungan lingkungan hidup adalah mencoba memasukan spesies-spesies ke dalam *Appendix CITES* sehingga menjadi produk kehutanan yang ilegal untuk diperdagangkan.

Berbagai permasalahan ini merupakan salah satu bukti sulitnya upaya harmonisasi antara perdagangan internasional dengan perlindungan lingkungan hidup.



Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO di Seattle, 1999, adalah suara aktivis lingkungan hidup mengenai dampak-dampak negatif apabila diadakan liberalisasi perdagangan di bidang kehutanan. Penurunan tarif dan penghapusan hambatan

perdagangan dapat menyebabkan *deforestation* yang akan banyak merugikan negara berkembang. Meskipun WTO sudah memiliki komisi khusus untuk membahas kedua sektor yang saling berkaitan ini, namun sangat sulit untuk dicapai penyelesaian.

(Muhammad Ajisatria)

## **Penebangan Liar Sebagai Ancaman**

<http://www.walhi.or.id>

<http://www.tempo.co.id>

Indonesia pernah dikenal sebagai negara yang memiliki area hutan terluas setelah Brasil dan Kongo. Namun kini, Indonesia telah dicanangkan menjadi negara penghancur hutan tercepat di dunia. Pada tahun 2000-2004, angka kerusakan meningkat. Badan Planologi Departemen Kehutanan memperkirakan angka 3,4 juta hektar hutan rusak setiap tahunnya. Pada tahun 2005 dan 2006, angka kerusakan turun kembali menjadi 2,7 – 2,8 juta hektar per tahun. Menurut data FAO, Indonesia menghancurkan hutan seluas 300 lapangan bola setiap jam.

Melalui hutan yang dimiliki, Indonesia merupakan negara terkaya kedua akan kehidupan alam liar diseluruh dunia. Hutan Indonesia diperkirakan memiliki 38.000 jenis tumbuhan, 515 jenis mamalia, 511 jenis reptilian, 1531 jenis burung, 270 jenis amphi

dan 1827 jenis binatang tak bertulang belakang<sup>2</sup>. Sayangnya, kekayaan alam tersebut akan punah secepat hilangnya hutan Indonesia.

Profesor Doktor Soekotjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada mengungkapkan bahwa penebangan liar merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan. Penebangan liar sendiri telah mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 3 triliun- Rp 3,3 Triliun tiap tahun. Kerusakan hutan bahkan telah menjadi ancaman bencana bagi masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2022 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut

---

<sup>2</sup> IBSAP, 2003.

merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan<sup>3</sup>. Sedangkan menurut data Walhi, dalam kurun waktu 2000 hingga 2006, terjadi 390 kali bencana banjir dan longsor yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 2.303 dan lebih dari 188 ribu rumah rusak berat dan setengah juta hektar lahan tidak dapat digunakan lagi. Total kerugian secara langsung mencapai 36.943 trilyun rupiah.

Data-data di atas menunjukkan bahwa kerusakan hutan menjadi isu inter-relasi yang mengancam seluruh sektor kehidupan. Dengan kata lain, penebangan liar telah menjadi ancaman laten bagi Indonesia. Secara nasional, praktek penebangan liar telah mencuri hutan 30.43 juta m<sup>3</sup>/tahun angka ini lebih besar dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2001 yang hanya 22.5 juta m<sup>3</sup>.

Namun, penebangan liar juga bukan satu-satunya penyebab rusaknya hutan di Indonesia. Tidak sedikit pula perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan legal yang tindakan eksploitasinya tidak pula terawasi dengan ketat. Hal ini menimbulkan banyak kerugian dan kecurangan yang tidak ternilai. Walhi mencatat bahwa pada pertengahan tahun 1990,

lebih dari 100 HPH dicabut izin karena pelanggaran konsesi HPH. Hal ini tentunya membuktikan bahwa dalam perizinan yang legal sekalipun masih juga terdapat tindak penebangan liar terselubung.

Penebangan liar di Indonesia memang tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan kelas ringan. Baik dalam jumlah pendanaan maupun jaringan, penebangan liar di Indonesia merupakan kejahatan terstruktur yang mencakup banyak pihak dari berbagai kalangan. Namun, dampak paling nyata juga terasa bagi pengusaha kayu berskala kecil yang harus kebingungan mencari kayu karena makin hilang dipasaran. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam laporannya pada tahun 2005 menyatakan bahwa Indonesia telah kehilangan devisa 7 milyar dollar AS per tahun dari sektor ini, dan ratusan ribu pekerja terancam kehilangan pekerjaan dalam dua tahun mendatang. Kehancuran hutan, ternyata juga mengancam sektor usaha dikemudian hari.

## MORATORIUM

Berkejaran dengan surutnya jumlah hutan yang ada di Indonesia, kalangan pemerhati lingkungan hidup khususnya hutan mengajukan usulan moratorium penebangan hutan.

---

<sup>3</sup> Bakornas Penanggulangan Bencana. 2003.

Moratorium adalah jeda waktu, pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala besar untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tertentu.

Moratorium (jeda) pembalakan kayu adalah pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut.

Moratorium dianggap cara yang paling efektif dalam mengentikan penghancuran hutan termasuk penebangan liar. Hal ini berarti, Indonesia secara sementara mengentikan seluruh kegiatan penebangan hutannya dalam jangka waktu tertentu. Dengan membekukan aktifitas penebangan hutan, maka pemerintah dapat mengevaluasi secara matang sebelum makin banyak hutan lagi yang musnah. Moratorium akan memberikan keuntungan ganda dalam

perbaikan pengelolaan sumberdaya hutan dan industri perkayuan yang berkelanjutan, seperti antara lain:

- memberikan ruang politik dan ekologi kepada hutan alam untuk 'bernafas' dan menahan berlanjutnya kehancuran hutan tropis di Indonesia;
- memberikan kesempatan terbaik untuk memonitor pelaksanaan lacak balak (*timber-tracking*) dan audit kayu bulat serta penyeragaman terhadap penebangan liar melalui teknologi monitoring satelit ;
- memberikan kesempatan untuk menata industri kehutanan dan hak-hak tenurial (penguasaan) sumber daya hutan, dan meningkatkan hasil sumber daya hutan non-kayu;
- mengkoreksi distorsi pasar kayu domestik dengan membuka keran impor seluas-luasnya, sehingga harga pasar kayu domestik sebanding dengan harga kayu bulat dunia;
- lewat mekanisme pasar, melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi industri olah kayu dan mengkoreksi over kapasitas industri: hanya industri yang melakukan bisnis dengan benar dan bersaing yang dapat melanjutkan bisnisnya dan yang mengandalkan suplai kayu haram dengan sendirinya tidak akan mampu bersaing;

- lewat mekanisme pasar, memaksa industri olah kayu meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku; dan

- lewat mekanisme pasar, mendorong industri pulp untuk secara serius membangun hutan-hutan tanamannya.

Walhi dalam kampanyenya juga memberikan berbagai tahapan solusi yang memungkinkan untuk dijalankan berkenaan dengan isu moratorium penebangan hutan ini melalui 5 tahap yakni:

- a. Tahap I, Penghentian pengeluaran ijin-ijin baru;
- b. Tahap II, pelaksanaan uji menyeluruh kinerja industri kehutanan;
- c. Tahap III, penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam;
- d. Tahap IV, penghentian sementara seluruh penebangan

hutan dan penyelesaian masalah-masalah potensi sosial;

- e. Tahap V, larangan penebangan hutan di seluruh Indonesia;

Aksi moratorium macam ini juga telah banyak menulai sukses memberantas penebangan liar di Negara-negara semisal Thailand, China dan Papua Nugini. Wakil Presiden Yusuf Kalla juga pernah mengusulkan hal senada menyoal moratorium penebangan hutan namun dilakukan secara terbatas dan bertahap. Moratorium hanya merupakan salah satu tindakan reaktif jangka pendek yang harus diikuti dengan upaya perbaikan hukum, hutan dan perangkat lainnya. Agar hutan Indonesia tidak lagi musnah dan menjadi ancaman laten bagi negeri sendiri.

**(Qurrata Ayuni, S.H.)**